

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adishakti, Laretna T. 2003. *Managing Heritage Environment In Asia*. Yogyakarta: Pusat Pelestarian Pusaka Arsitektur.
- Anderson, James E. 1979. *Public Policy Making*. New York NJ: Holt Reinhartnwinston.
- Ashafa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshidiqie, Jimmly. 2011. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Press.
- Attahiyat, Candrian. 2000. *Bangunan Cagar Budaya di Propinsi DKI Jakarta*. Jakarta: Dinas Museum.
- Bruggink, J. J. H. 1999. *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dahana, M. M. 2012. *Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap Wisatawan*. Surabaya: Paramita.
- Djamali, R. Abdoel. 2008. *Pengantar Hukum Indonesia Ed. Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dunn, William N. 1993. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R. 1995. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall.
- Erna Widodo, Mukhtar. 2000. *Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif*. Yogyakarta: Avyrouz.
- Ida Zuraida dan L. Y. Hari Sih Advianto. 2001. *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Indonesia, Lembaga Administrasi Negara Republik. 2008. *Analisis Kebijakan Publik MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT III*. Jakarta: LAN.
- Indrati, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan Bagian I*. Yogyakarta: Kanisius.
- Koentjaraningrat. 1986. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Madani, Muhlis. 2011. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Manan, Bagir. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill Co.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mustafa, Bachsan. 2003. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Supratikno. 2011. *Pengelolaan Warisan Budaya Indonesia*. Bandung: Lubuk Agung.
- Semiawan, Conny R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.

- Siahaan, Mariot P. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- . 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Soekiman, Djoko. 2000. *Kebudayaan Indis*. Semarang: Yayasan Bentang Budaya.
- Soerjono, Abdurrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suandy, Erly. 2005. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Thoha, Miftah. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Timbul Hamongan, Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Vlies, Van De. 1987. *Handboek Wetgeving*. Zwolle: Tjeenk Willink.
- W., Widjaja A. 1985. *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*. Jakarta: Era Persada.
- Widodo, Boediono Teguh. 2014. *Pedoman Umum Pengelolaan PBB P2*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik, Teori, dan Proses*. Yogyakarta: Medpress.

B. Penulisan Hukum

- Zulaikha, Intan. 2018. “Pelaksanaan Ketentuan Ganti Kerugian Dalam Penemuan Fosil Purbakala Oleh Masyarakat (Studi Pada Museum Purbakala Sangiran)”, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penghargaan Pelestari Warisan Budaya dan Cagar Budaya
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah
- Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pedoman Perhitungan Pemberian Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Bangunan Cagar Budaya dan Bangunan Warisan Budaya
- Keputusan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 197 Tahun 2019 tentang Daftar Warisan Budaya Daerah Yogyakarta
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.6/2001 tentang Peningkatan Pokok Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan

D. Jurnal

- Putra, I Wayan Eka Darma dan Anak Agung Ketut Sukranatha, “Pengaturan Kewenangan Desa Dalam Pengelolaan Pariwisata”, Kerthanegara, Vol. 2, No. 5, 2014
- Brooks, Graham. “The Burra Charter: Australian’s Methodology for Conserving Cultural Heritage”, College of Environmental Design, Vol. 8, No. 1, 1992. Retrieved from <https://escholarship.org/uc/item/3391f9g5>
- Afif, Zaid. “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia”, Jurnal Dialog, Vol 7, No. 1, Hal 1 – 15, 2018
- Sudharta, B. Arief. “Filsafat Hukum Pancasila, Seminar Nasional ”Nilai-nilai Pancasila sebagai Nilai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia”, Makalah Seminar, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta Selatan. 2007.

E. Internet

- Bappeda DI Yogyakarta. “Grafik Series Data DIY Tahun 2017 s/d 2021, Jumlah Bangunan Cagar Budaya”, bappeda.jogjaprovo.go.id, diakses pada 28 Mei 2021, http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/chart/199

- Bappeda DI. Yogyakarta. “Grafik Series Data DIY Tahun 2017 s/d 2021, Jumlah Objek Wisata”, bappeda.jogjaprov.go.id, diakses pada 28 Mei 2021, http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/214-jenis-objek-wisata#4
- Hastijanti, Retno. “Analisis Penilaian Bangunan Cagar Budaya”, researchgate.net, 16 September 2008, https://www.researchgate.net/publication/308203329_Analisis_Penilaian_Bangunan_Cagar_Budaya
- Huda, Ni'matul, dan Sonny Maulana Sikumbang. “Rancangan Peraturan Harus Punya Naskah Akademik”, hukumonline.com, 11 Maret 2011, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d79e4c779bb0/rancangan-peraturan-harus-punya-naskah-akademik?page=2>